

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat fondasi ketahanan nasional (Wahyuni *et al.*, 2024). Pembangunan ekonomi juga bertujuan untuk memperbaiki kondisi perekonomian yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Konsep pembangunan ekonomi bukan hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menekankan pada pendistribusian secara adil dari hasil pembangunan (Kusumanegara & Karmini, 2023). Todaro (2006) menjelaskan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh, sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan manfaatnya. Pembangunan ekonomi secara umum bertujuan untuk menumbuhkan standar hidup melalui peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, dan perbaikan akses pendidikan; perluasan pilihan ekonomi dan sosial; serta peningkatan pasokan dan distribusi berbagai kebutuhan pokok (Aisyah *et al.*, 2025).

Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak dapat ditunjukkan dari tingginya Produk Domestik Bruto, tetapi juga ditunjukkan melalui upaya untuk mendorong aspek pembangunan lainnya termasuk pembangunan manusia. Pembangunan manusia menjadi salah satu indikator dalam mengukur kemajuan suatu negara (Puspitasari, 2023). Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan serta menjadi sumber kekayaan bagi negara. Pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat hidup damai, sehat jasmani dan rohani, serta sejahtera (Wicaksono, 2021).

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1990 menetapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pembangunan manusia di suatu wilayah (Wulandari, 2023). Indeks Pembangunan Manusia mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki peran yang sama penting dalam menggambarkan kualitas pembangunan manusia (Andriani, 2023). Penelitian ini memfokuskan pada dimensi pendidikan karena pendidikan berperan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu sebagai dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia. Teori *Human Capital* menjelaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan meningkatkan produktivitas individu melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Teori Pembangunan Manusia yang dikemukakan Amartya Sen juga menjelaskan bahwa pendidikan memperluas kapabilitas (*capabilities*) individu sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Hasil dari investasi dan perluasan kapabilitas tersebut akan mendukung peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, pendapatan, dan kemampuan individu untuk menjaga kesehatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya menjadi salah satu dimensi pembangunan manusia, tetapi juga menjadi fondasi yang memperkuat dimensi pembangunan manusia lainnya. Penelitian ini memfokuskan pada dimensi pendidikan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pengaruh pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan. Penelitian ini menggunakan indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) karena indikator tersebut menggambarkan capaian pendidikan yang telah ditempuh oleh masyarakat, sehingga dapat merepresentasikan kondisi pendidikan sebenarnya.

Tabel 1.1 Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) di 34 Provinsi Indonesia Tahun 2022-2024

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Aceh	9,79	9,89	9,95
2	Sumatera Utara	9,99	10,07	10,18
3	Sumatera Barat	9,51	9,59	9,72
4	Riau	9,54	9,60	9,69
5	Jambi	9,07	9,16	9,26
6	Sumatera Selatan	8,82	8,90	8,98
7	Bengkulu	9,28	9,35	9,40
8	Lampung	8,61	8,72	8,80
9	Kep. Bangka Belitung	8,57	8,66	8,78
10	Kep. Riau	10,46	10,52	10,65
11	DKI Jakarta	11,30	11,42	11,49
12	Jawa Barat	9,14	9,16	9,24
13	Jawa Tengah	8,38	8,44	8,47
14	DI Yogyakarta	10,07	10,16	10,23
15	Jawa Timur	8,50	8,53	8,69
16	Banten	9,46	9,48	9,55
17	Bali	9,74	9,74	9,87
18	Nusa Tenggara Barat	8,31	8,39	8,50
19	Nusa Tenggara Timur	8,25	8,31	8,48
20	Kalimantan Barat	8,10	8,17	8,28
21	Kalimantan Tengah	9,03	9,07	9,17
22	Kalimantan Selatan	8,89	8,95	9,02
23	Kalimantan Timur	10,13	10,17	10,22
24	Kalimantan Utara	9,45	9,53	9,58
25	Sulawesi Utara	9,87	9,94	10,02
26	Sulawesi Tengah	9,17	9,22	9,28
27	Sulawesi Selatan	9,09	9,12	9,22
28	Sulawesi Tenggara	9,59	9,62	9,74
29	Gorontalo	8,39	8,48	8,64
30	Sulawesi Barat	8,47	8,48	8,56
31	Maluku	10,37	10,38	10,44
32	Maluku Utara	9,60	9,61	9,70
33	Papua Barat	10,14	10,14	9,87
34	Papua	7,31	7,34	10,70
	Indonesia	8,69	8,77	8,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, (2025)

Tabel 1.1 memperlihatkan adanya peningkatan capaian indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia yang dioperasionalkan menggunakan rata-rata lama sekolah. Peningkatan tersebut belum mencerminkan pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut terlihat dari masih adanya sejumlah provinsi yang memiliki rata-rata lama sekolah di bawah angka nasional seperti Provinsi Kep. Bangka Belitung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketimpangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah. Ketimpangan ini berpotensi menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah pendidikan, yang berperan penting dalam membentuk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam meningkatkan kemampuan kognitif, pengetahuan, serta keterampilan individu yang mendukung pengembangan kualitas hidup masyarakat (Ozawa *et al.*, 2022). Pendidikan yang rendah berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia serta terbatasnya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan potensi diri (Rohman, 2023). Pemerintah telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui program pelatihan dan pemagangan dalam negeri yang dilaksanakan secara sistematis. Pelatihan dan pemagangan menjadi salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan dalam mendukung peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat. Pendidikan formal umumnya memberikan dasar pengetahuan yang bersifat teoritis. Sementara itu, pendidikan nonformal dalam bentuk pelatihan berfokus pada pengembangan kemampuan praktis yang dapat

menunjang peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami teknologi, berpikir kritis, dan beradaptasi dengan perubahan sebagai bagian dari upaya peningkatan sumber daya manusia (Parta *et al.*, 2023).

Tabel 1.2 Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) (Orang) di 34 Provinsi Indonesia

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Aceh	5.305	4.278	2.912
2	Sumatera Utara	5.412	4.151	3.166
3	Sumatera Barat	3.741	5.304	3.776
4	Riau	1.344	749	592
5	Jambi	2.336	2.146	1.344
6	Sumatera Selatan	2.000	2.752	3.441
7	Bengkulu	2.968	1.344	1.501
8	Lampung	1.024	2.352	1.918
9	Kep. Bangka Belitung	1.552	1.312	793
10	Kep. Riau	1.632	390	412
11	DKI Jakarta	2.536	360	175
12	Jawa Barat	16.092	22.696	12.526
13	Jawa Tengah	12.629	23.321	16.276
14	DI Yogyakarta	1.488	1.520	899
15	Jawa Timur	15.928	20.175	10.930
16	Banten	5.516	5.755	3.270
17	Bali	4.256	2.064	1.424
18	Nusa Tenggara Barat	1.584	6.286	3.678
19	Nusa Tenggara Timur	2.088	1.440	991
20	Kalimantan Barat	3.080	1.408	1.279
21	Kalimantan Tengah	1.344	1.193	1.313
22	Kalimantan Selatan	1.456	1.850	640
23	Kalimantan Timur	3.267	3.556	1.215
24	Kalimantan Utara	784	464	288
25	Sulawesi Utara	864	607	316
26	Sulawesi Tengah	1.472	1.377	805
27	Sulawesi Selatan	4.304	9.436	5.552
28	Sulawesi Tenggara	2.676	2.592	1.776
29	Gorontalo	992	726	553
30	Sulawesi Barat	368	589	112
31	Maluku	2.684	2.061	1.230
32	Maluku Utara	2.112	1.708	1.295
33	Papua Barat	688	1.727	245
34	Papua	1.104	575	205

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas, (2025)

Tabel 1.2 memperlihatkan bahwa jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi di seluruh provinsi cenderung mengalami penurunan pada tahun 2024. Penurunan tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran, rendahnya minat masyarakat, dan kurangnya sosialisasi program pelatihan. Penelitian Rahma (2023) mengungkapkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta memiliki kendala dalam pelaksanaan pelatihan yaitu keterbatasan anggaran dalam program pelatihan dan penyesuaian pelatihan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pelatihan belum optimal dalam menjangkau masyarakat luas. Padahal, pelatihan memiliki peran penting dalam meningkatkan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia. Apabila kondisi ini berlanjut, maka berpotensi menghambat peningkatan capaian pendidikan masyarakat.

Pemerintah juga menyelenggarakan program pemagangan dalam negeri untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan dalam peraturannya menjelaskan bahwa pemagangan termasuk bentuk dari pelatihan yang dilaksanakan secara terstruktur di lembaga pelatihan. Program pemagangan dalam negeri bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkompeten (Pratama, 2025).

Tabel 1.3 Jumlah Peserta Pemagangan Dalam Negeri (Orang) di 34 Provinsi Indonesia

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Aceh	294	210	206
2	Sumatera Utara	1.545	459	414
3	Sumatera Barat	780	284	186
4	Riau	903	181	164
5	Jambi	581	167	194
6	Sumatera Selatan	717	700	469
7	Bengkulu	356	147	193
8	Lampung	930	192	207

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
9	Kep. Bangka Belitung	556	163	185
10	Kep. Riau	479	537	210
11	DKI Jakarta	3.472	11.840	11.199
12	Jawa Barat	10.256	10.543	1.255
13	Jawa Tengah	3.530	4.293	414
14	DI Yogyakarta	930	1.296	314
15	Jawa Timur	3.256	1.905	348
16	Banten	2.189	3.068	783
17	Bali	1.089	973	215
18	Nusa Tenggara Barat	730	351	319
19	Nusa Tenggara Timur	682	408	292
20	Kalimantan Barat	604	167	196
21	Kalimantan Tengah	430	833	196
22	Kalimantan Selatan	663	468	227
23	Kalimantan Timur	788	442	222
24	Kalimantan Utara	245	144	110
25	Sulawesi Utara	766	370	309
26	Sulawesi Tengah	414	167	189
27	Sulawesi Selatan	1.022	325	213
28	Sulawesi Tenggara	372	178	193
29	Gorontalo	446	244	230
30	Sulawesi Barat	290	142	183
31	Maluku	391	168	197
32	Maluku Utara	280	164	192
33	Papua Barat	412	198	209
34	Papua	379	245	202

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas, (2025)

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah peserta pemagangan dalam negeri mengalami fluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2024 seperti Provinsi Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa partisipasi penduduk usia produktif dalam program pemagangan belum optimal. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan akses, kurangnya informasi, dan ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Pemagangan merupakan sarana penting dalam meningkatkan keterampilan praktis yang dapat mendukung pendidikan formal. Partisipasi pemagangan yang rendah berpotensi menghambat peningkatan kualitas pendidikan masyarakat.

Kuantitas pendidik juga menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan rata-rata lama sekolah. Kuantitas pendidik diukur melalui jumlah instruktur pelatihan atau tenaga pendidik yang tersedia. Instruktur pelatihan menjadi salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan dan pelatihan (Badarani, 2024). Jumlah instruktur pelatihan atau tenaga pendidik yang semakin banyak dapat meningkatkan peluang masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang memadai. Ketersediaan dan kompetensi pendidik atau instruktur dalam suatu pembelajaran memiliki peran penting dalam menentukan kualitas peserta didik (Kurnia & Sanjaya, 2023).

Tabel 1.4 Jumlah Instruktur Pelatihan atau Tenaga Pendidik (Orang) di 34 Provinsi Indonesia

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
1	Aceh	241	270	400
2	Sumatera Utara	337	447	1033
3	Sumatera Barat	260	294	490
4	Riau	263	278	414
5	Jambi	110	137	289
6	Sumatera Selatan	257	291	458
7	Bengkulu	124	132	225
8	Lampung	230	258	475
9	Kep. Bangka Belitung	115	136	154
10	Kep. Riau	107	128	143
11	DKI Jakarta	528	563	2156
12	Jawa Barat	960	1966	3402
13	Jawa Tengah	992	518	2236
14	DI Yogyakarta	201	348	411
15	Jawa Timur	1063	586	2861
16	Banten	267	149	892
17	Bali	172	352	588
18	Nusa Tenggara Barat	292	158	875
19	Nusa Tenggara Timur	135	146	216
20	Kalimantan Barat	176	138	222
21	Kalimantan Tengah	128	240	288
22	Kalimantan Selatan	195	398	631

No	Provinsi	Tahun		
		2022	2023	2024
23	Kalimantan Timur	174	134	505
24	Kalimantan Utara	102	135	153
25	Sulawesi Utara	147	186	171
26	Sulawesi Tengah	173	236	273
27	Sulawesi Selatan	332	262	1140
28	Sulawesi Tenggara	124	182	322
29	Gorontalo	142	128	245
30	Sulawesi Barat	121	154	195
31	Maluku	145	126	157
32	Maluku Utara	153	230	289
33	Papua Barat	151	256	280
34	Papua	173	121	144

Sumber: Kemnaker RI, Ditjen. Binalavotas, (2025)

Tabel 1.4 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah instruktur pelatihan di beberapa provinsi masih terbatas dan belum tersebar merata. Keterbatasan jumlah instruktur dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. Beberapa wilayah masih mengalami kekurangan tenaga instruktur, terutama di wilayah terpencil. Ketimpangan distribusi tenaga instruktur antara perkotaan dan pedesaan juga menjadi masalah yang belum terselesaikan. Jumlah instruktur yang semakin sedikit membatasi kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan keterampilan semakin terbatas. Kondisi ini berdampak pada rendahnya akses pendidikan di beberapa wilayah. Kondisi tersebut mengakibatkan tingkat pendidikan di wilayah tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan wilayah lain.

Pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan kuantitas pendidik merupakan faktor yang saling berkaitan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

Pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan dan kompetensi individu yang dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Pemagangan memberikan pengalaman praktis yang dapat memperkuat kemampuan dan pengembangan potensi individu dalam proses pendidikan. Ketersediaan instruktur atau tenaga pendidik menentukan akses dan kualitas proses pembelajaran. Pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan kuantitas pendidik diduga memiliki pengaruh terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah sebagai indikator indeks pendidikan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan melalui pelatihan dan pemagangan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan individu. Penelitian Delima *et al.* (2025) menyatakan bahwa pendidikan berperan penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan sehingga memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini selaras dengan Shoolihah & Musyaropah (2024) menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian Pratiwi & Cahyono (2023) menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pelatihan dan pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan kualitas masyarakat sehingga dapat mendukung indeks pendidikan. Penelitian Silviani *et al.* (2023) menunjukkan bahwa program pemagangan dalam negeri berdampak dalam meningkatkan pengetahuan dan kompetensi. Penelitian Shobri & Syahbudi (2022) menunjukkan bahwa jumlah tenaga pendidik berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pendidikan.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya, terdapat celah penelitian yang meninjau pengaruh pelatihan, pemagangan, dan kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan. Sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan makro dan belum mengkaji indikator yang lebih spesifik. Penelitian terdahulu umumnya menggunakan IPM secara keseluruhan tanpa memfokuskan pada dimensi pendidikan secara khusus. Penggunaan variabel seperti pelatihan, pemagangan dalam negeri, kuantitas pendidik masih jarang dilakukan secara simultan. Penelitian dengan cakupan seluruh provinsi di Indonesia dan periode waktu yang panjang masih terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menggunakan indikator yang lebih spesifik serta pendekatan data panel.

Penelitian ini memiliki urgensi karena pendidikan berperan dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu sebagai dasar pengembangan kualitas sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas. Pemerintah mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyelenggaraan program pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan penyediaan tenaga pendidik. Ketiga program tersebut menyerap alokasi anggaran pemerintah yang besar sehingga memerlukan pembuktian empiris terhadap efektivitas pelaksanaannya. Keterbatasan bukti empiris tersebut berpotensi menyebabkan pemerintah mempertahankan atau memperluas program yang belum terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan indeks pendidikan. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan pemanfaatan anggaran kurang efektif, memperlebar kesenjangan capaian pendidikan antarprovinsi, serta menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan

kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan sehingga hasil penelitian dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024?
2. Bagaimana pengaruh pemagangan dalam negeri terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024?
3. Bagaimana pengaruh kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024?
4. Bagaimana pengaruh secara simultan antara pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, diperoleh tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemagangan dalam negeri terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024.

4. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan antara pelatihan, pemagangan dalam negeri, dan kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan di 34 provinsi Indonesia tahun 2015-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sejumlah manfaat sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam kajian teoritis yang berkenaan dengan bidang pembangunan manusia, khususnya mengenai keterkaitan antara pelatihan, pemagangan, dan kuantitas pendidik terhadap indeks pendidikan.

2. Praktik

- a) Bagi Pemerintah adalah sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pelatihan dan pemagangan, khususnya dalam pengembangan dan pemerataan instruktur pelatihan sebagai upaya peningkatan indeks pendidikan.
- b) Bagi Swasta adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan sarana pendukung pendidikan dan kerja sama dengan pihak pemerintah.
- c) Bagi Masyarakat adalah sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan informasi dan pemahaman mengenai pentingnya pelatihan dan pemagangan dalam meningkatkan kalitas sumber daya manusia. selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif mengikuti program pendidikan dan

pengembangan kemampuan guna meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan hidup.